

ABSTRAKSI

Kebebasan merupakan hak azasi setiap manusia. Saat ini Rusia merupakan negara yang sedang membangun demokrasi dalam pemerintahannya. Terdapat transisi dari masa runtuhnya Uni Soviet menuju negara Federasi Rusia yang berdiri sendiri seperti saat ini. Rusia merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang banyak mewarisi kedigjayaan dari negara saingan AS tersebut. Muslim di Rusia merupakan jumlah penduduk terbanyak kedua dengan jumlah sekitar 20 juta jiwa. Perjuangan kaum muslim Rusia juga mendapat berbagai rintangan dari pemerintah Uni Soviet. Hubungan antara pemerintah Rusia dan kaum Muslim hingga awal 1990-an masih diwarnai kesalahpahaman dan kecurigaan. Kaum muslim mengalami banyak tekanan dari pemerintah.

Pada pemerintahan Putin, seharusnya komunitas muslim memiliki kebebasan yang sama dengan warga negara lainnya. Terutama menyangkut masalah untuk menduduki jabatan di dalam kabinet. Pada masa pemerintahan sebelumnya, tidak ada kebijakan yang memberikan kebebasan kepada komunitas muslim untuk berpolitik ataupun masuk dalam jabatan-jabatan di pemerintahan. Hal ini terkait dengan ideologi komunis yang sangat diktator yang digunakan negara tersebut.

Rusia sedang menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Islam di dunia dengan menjadi negara peninjau pada beberapa pertemuan OKI (Organisasi Konferensi Islam) sejak tahun 2006. Sebelumnya juga pada pembentukan kabinet tahun 2004, Putin mengangkat salah seorang muslim untuk menjabat sebagai menteri di dalam kabinetnya. Menteri-menteri di Rusia diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan dari Perdana Menteri. Hanya menteri pertahanan yang usulannya berdasarkan Duma Negara. Keberadaan muslim saat ini mulai diakui keberadaannya seiring dengan bertambah banyaknya masjid maupun sekolah-sekolah islam. Hal ini menunjukkan pentingnya aspirasi muslim di dengar oleh kaum elit politik pada pemerintahan di Rusia.

Pada pemilihan umum di tahun 1999 dan 2003, kaum muslim Rusia tidak begitu diperhitungkan mengingat minimnya partai politik yang berbasiskan Islam muncul pada tahun tersebut. Sedikitnya pemilih dari masyarakat muslim, berdampak pada wakil dari parpol yang akan duduk dalam Parlemen, bahkan dalam Kabinet. Anggota Kabinet dipilih oleh Presiden dengan persetujuan Perdana Menteri terlebih dahulu. Kehadiran kaum muslim di parlemen dan jabatan penting di pemerintahan